

**KEBERHASILAN KELEMBAGAAN ADAT DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK TANAH PASCA TSUNAMI DI LUAR PERADILAN: STUDI
KASUS DI GAMPONG LAMDINGIN, KOTA BANDA ACEH.**

TESIS

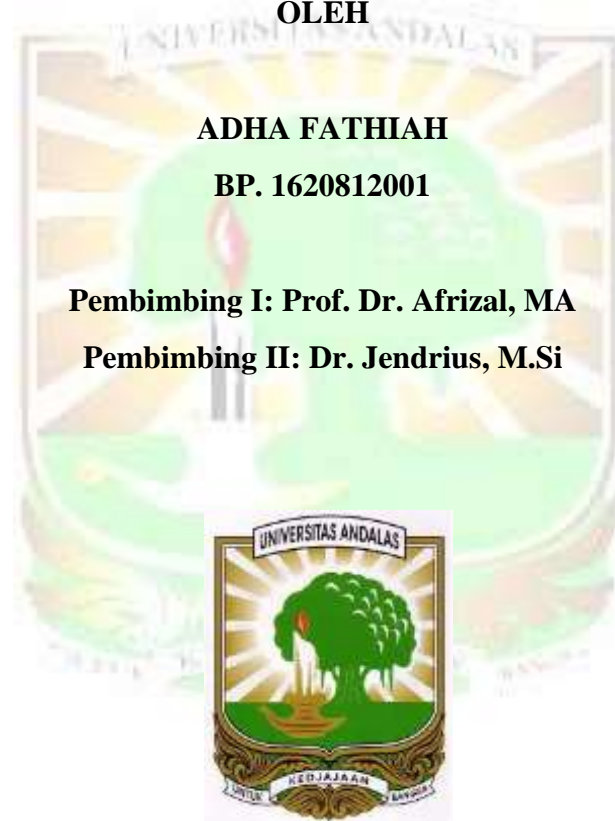
OLEH

ADHA FATHIAH

BP. 1620812001

Pembimbing I: Prof. Dr. Afrizal, MA

Pembimbing II: Dr. Jendrius, M.Si



**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2019

ABSTRAK

Adha Fathiah, 1620812001, Program Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Judul Tesis: Keberhasilan Kelembagaan Adat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Pasca Tsunami di Luar Peradilan: Studi Kasus di Gampong Lamdingin, Kota Banda Aceh. Pembimbing I Prof. Dr. Afrizal, MA dan Pembimbing II Dr. Jendrius, M.Si

Gelombang Tsunami di Aceh pada tahun 2004 mengakibatkan terjadinya pergeseran pada sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Selain itu, bencana gempa dan Tsunami juga menghancurkan infrastruktur dan berbagai macam bangunan, terutama perumahan penduduk. Salah satu persoalan yang ditimbulkan adalah sulitnya untuk menemukan batas-batas tanah yang telah hilang akibat bencana tersebut, ini menyebabkan terjadinya konflik antar warga Gampong yang tinggal berdampingan. Tujuan penelitian adalah; 1) Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa konflik tanah pasca Tsunami dan pihak ketiga yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tanah pasca Tsunami; 2) Mendeskripsikan proses yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menyelesaikan konflik dan oleh para pihak yang terlibat pertikaian untuk mengakhiri peristiwa konflik tanah pasca Tsunami; 3) Mendeskripsikan solusi yang dihasilkan oleh pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian peristiwa konflik tanah akibat Tsunami. Manfaat penelitian adalah; 1) Memperkaya referensi tentang penyelesaian konflik tanah di luar peradilan; 2) Bahan masukan dan informasi bagi pemerintah daerah mengenai penyelesaian konflik tanah di luar peradilan. Teori yang digunakan adalah teori Resolusi Konflik oleh Hugh Miall dkk, serta teori perilaku para pihak oleh Pruitt dan Rubin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan seluruh konflik yang terjadi di Gampong Lamdingin diselesaikan dalam komunitas dengan menggunakan mekanisme adat. Pihak ketiga dalam penyelesaian adalah Keuchik yang dibantu oleh Kepala Dusun dan Tuha Peut. Sebanyak 82,5% konflik dapat diselesaikan dan 17,5% berlanjut ke pengadilan. Penyebab konflik berlanjut ke pengadilan adalah para pihak tidak puas dengan keputusan Keuchik. Ini umumnya konflik pertanahan yang terjadi antara orang yang bersaudara yang kedua orang tuanya meninggal dunia akibat Tsunami. Diketahui bahwa terdapat proses-proses yang dilakukan oleh Keuchik, Kepala Dusun, dan Tuha Peut untuk menyelesaikan konflik tanah pasca Tsunami di Gampong Lamdingin. Pertama sekali salah satu pihak melapor kepada Keuchik atau Kepala Dusun mengenai pertikaian yang terjadi, kemudian Keuchik mengundang para pihak yang bertikai untuk diminta keterangannya, selanjutnya klarifikasi objek perkara dilakukan, diadakan musyawarah internal pemimpin Gampong, dan yang terakhir adalah penyampaian keputusan sementara kepada para pihak yang bertikai.

Kata Kunci: *Penyelesaian Konflik Tanah, Pasca Tsunami, Lembaga Adat.*

ABSTRACT

Adha Fathiah, 1620812001, Masters Program in Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University. Title of Thesis: Success of Customary Institutions in Post-Tsunami Land Conflict Resolution Outside the Judiciary: Case Study in Lamdingin Village, Banda Aceh City. Advisor I Prof. Dr. Afrizal, MA and Advisor II Dr. Jendrius, M.Sc.

The Tsunami in Aceh in 2004 resulted in a shift in the joints of the social, economic and cultural life of the people. In addition, the earthquake and Tsunami disaster also destroyed infrastructure and various types of buildings, especially residential housing. One of the problems caused was the difficulty to find land boundaries that had been lost due to the disaster, this caused a conflict between Gampong residents who lived side by side. The research objectives are; 1) Identify parties involved in the events of land conflicts post Tsunami and third parties involved in the process of resolving land conflicts post Tsunami; 2) Describe the process carried out by third parties who resolve the conflict and by the parties involved in the dispute to end the event of land conflict after the Tsunami; 3) Describe solutions produced by third parties involved in resolving Tsunami land conflicts. The benefits of research are; 1) Enriching references on resolving land conflicts outside the court; 2) Material input and information for local governments regarding the resolution of land conflicts outside the court. The theory used is the theory of Conflict Resolution by Hugh Miall et al., And the theory of behavior of the parties by Pruitt and Rubin. This research is a qualitative research with in-depth interview data collection techniques. The results of the study found that all conflicts that occurred in Lamdingin Village were settled in the community using customary mechanisms. The third party in the settlement is the Keuchik who is assisted by the Head of the Hamlet and Tuha Peut. As many as 82.5% of conflicts can be resolved and 17.5% continue to court. The cause of the conflict continued to the court was that the parties were not satisfied with the Keuchik's decision. This is generally a land conflict that occurs between siblings whose parents died as a result of the Tsunami. It is known that there are processes carried out by the Keuchik, the Head of the Hamlet, and the Tuha Peut to resolve land conflicts after the Tsunami in the Lamdingin Village. First, one party reports to the Keuchik or the Head of the Hamlet about the dispute that occurred, then the Keuchik invites the conflicting parties to be asked for information, then clarification of the object of the case is carried out, an internal meeting of the Gampong leader is held, and the last is the provisional decision to the parties fight.

Keywords: *Land Conflict Resolution, Post Tsunami, Customary Institutions.*